



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 74 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan penilaian kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 23) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Juni 2018
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul,
pada tanggal 25 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 74

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI BANTUL NOMOR 23 TAHUN

2018 TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA

PERANGKAT DAERAH

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA

PERANGKAT DAERAH

- I. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN
- a. alokasi nilai kriteria dan sub kriteria penilaian untuk evaluasi kinerja triwulan I sampai dengan triwulan III adalah :
- 1) Kecamatan

No	Kriteria	Bobot	Sub kriteria	Nilai
1	Perencanaan	25%	a. keselarasan DPA dengan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan KUA-PPAS; dan	15
			b. penyusunan ROPK.	10
2	Pelaksanaan	30%	a. realisasi kegiatan fisik;	7,5
			b. realisasi keuangan;	7,5
			c. penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan;	5
			d. revisi DPA; dan	5
			e. pengumuman RUP dalam SIRUP.	5
3	Pelaporan	25%	a. laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIM;	10

No	Kriteria	Bobot	Sub kriteria	Nilai
			b. laporan indikator kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja; dan	10
			c. laporan aset per triwulan.	5
4	Capaian	20%	a. evaluasi hasil renja;	10
			b. tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan	5
			c. fasilitasi ketepatan pencairan ADD dan DD.	5
Jumlah Total		100%		100

2) Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah :

No	Kriteria	Bobot	Sub kriteria	Nilai
1	Perencanaan	25%	a. keselarasan DPA dengan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan KUA-PPAS; dan	15
			b. penyusunan ROPK.	10
2	Pelaksanaan	35%	a. penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan;	10
			b. realisasi kegiatan fisik;	7,5
			c. realisasi keuangan;	7,5
			d. revisi DPA; dan	5
			e. pengumuman RUP dalam SIRUP.	5
3	Pelaporan	25%	a. laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIM;	10
			b. laporan indikator kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja; dan	10

			c. laporan aset per triwulan.	5
4	Capaian	15%	a. evaluasi hasil renja; dan b. tindak lanjut hasil pemeriksaan.	10 5
Jumlah Total		100%		100

b. alokasi nilai kriteria dan sub kriteria penilaian untuk evaluasi kinerja triwulan IV adalah :

1) Kecamatan

No	Kriteria	Bobot	Sub-Kriteria	Nilai
1	Perencanaan	25 %	a. keselarasan DPA dengan RPJMD, Renstra, RKPD dan KUA-PPAS; dan	15
			b. penyusunan ROPK.	10
2	Pelaksanaan	25%	a. realisasi kegiatan fisik;	5
			b. realisasi keuangan;	5
			c. penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan;	5
			d. revisi DPA; dan	5
			e. proses pengadaan barang dan jasa.	5
3	Pelaporan	15%	a. laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIM; dan	10
			b. laporan aset per triwulan.	5
4	Capaian	25%	a. indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil Renja;	7,5
			b. indikator kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja;	7,5
			c. nilai IKM; dan	5
			d. fasilitasi ketepatan pencairan ADD dan realisasi APBDes.	5

No	Kriteria	Bobot	Sub-Kriteria	Nilai
5	Evaluasi	10%	a. evaluasi AKIP; dan	5
			b. hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya.	5
Jumlah Total		100%		100

2) Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah :

No	Kriteria	Bobot	Sub kriteria	Nilai
1	Perencanaan	25 %	a.keselarasan DPA dengan RPJMD, Renstra, RKPD dan KUA-PPAS; dan	15
			b.penyusunan ROPK.	10
2	Pelaksanaan	25%	a. realisasi kegiatan fisik;	5
			b. realisasi keuangan;	5
			c. penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan;	5
			d. revisi DPA; dan	5
			e. proses pengadaan barang dan jasa.	5
3	Pelaporan	15%	a. ketepatan laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIM; dan	10
			b. laporan aset per triwulan.	5
4	Capaian	25%	a. evaluasi hasil renja;	10
			b. indikator kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja; dan	10
			c. nilai IKM.	5

No	Kriteria	Bobot	Sub kriteria	Nilai
5	Evaluasi	10%	a. evaluasi AKIP; dan b. hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya.	5 5
Jumlah Total		100%		100

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI BANTUL NOMOR 23

TAHUN 2018 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

EVALUASI KINERJA PERANGKAT

DAERAH

LEMBAR KRITERIA EVALUASI KINERJA TRIWULAN I SAMPAI DENGAN

TRIWULAN III

A. KECAMATAN

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
A.	PERENCANAAN		
1.	Keselarasan DPA dengan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan KUA-PPAS	a. apabila keselarasan mencapai 100%; b. apabila keselarasan antara 90% s/d < 100%; c. apabila keselarasan antara 80% s/d < 90%; d. apabila keselarasan antara 70% s/d < 80%; dan e. apabila keselarasan < 70%.	5 4 3 2 1
2.	Penyusunan ROPK		
	a. ketepatan waktu penyusunan ROPK	a. apabila penyusunan ROPK dilaksanakan maksimal 15 hari kalender setelah APBD disahkan; b. apabila penyusunan ROPK dilaksanakan >15 hari s/d 30 hari kalender setelah APBD disahkan c. apabila penyusunan ROPK; dan dilaksanakan >30 hari setelah APBD disahkan.	5 3 1

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
	b. kelengkapan penyusunan ROPK fisik dan keuangan	a. apabila ROPK fisik dan keuangan kegiatan telah disusun mencapai 90% s/d 100%; b. apabila ROPK fisik dan keuangan kegiatan telah disusun mencapai 70% s/d < 90%; dan c. apabila ROPK fisik dan keuangan kegiatan telah disusun < 70%.	5 3 1
B.	PELAKSANAAN		
1	Realisasi kegiatan fisik (deviasi realisasi fisik dibandingkan target)	a. apabila deviasi <5 %; b. apabila deviasi antara 5% s/d <10%; dan c. apabila deviasi ≥10%.	5 3 1
2	Realisasi keuangan (deviasi realisasi keuangan dibandingkan target)	a. apabila deviasi <5 %; b. apabila deviasi antara 5% s/d <10%; dan c. apabila deviasi ≥10%.	5 3 1
3.	Penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan (pengajuan SPM)	a. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai ≥ 90%; b. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 80% s/d <90%; c. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 70% s/d <80%; d. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 60% s/d <70%; dan e. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai <60%.	5 4 3 2 1

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
4.	Revisi DPA	a. apabila tidak ada revisi DPA; b. apabila revisi DPA dilakukan 1 kali; c. apabila revisi DPA dilakukan 2 kali; d. apabila revisi DPA dilakukan 3 kali; dan e. apabila revisi DPA dilakukan lebih dari 3 kali.	5 4 3 2 1
5.	Pengumuman RUP dalam SIRUP	a. RUP lengkap terumumkan pada tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya; b. RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 20 Desember tahun anggaran sebelumnya; c. RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya; d. RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 10 Januari tahun anggaran berjalan; dan e. RUP lengkap terumumkan setelah tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berjalan.	5 4 3 2 1
C.	PELAPORAN		
1.	Laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIM	a. apabila laporan realisasi fisik dan keuangan disampaikan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya; dan b. apabila laporan realisasi fisik dan keuangan disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	5 1
2.	Laporan indikator kinerja dalam	a. apabila realisasi indikator kinerja sampai dengan eselon IV	5

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
	sistem akuntabilitas kinerja	disampaikan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya; dan b. apabila realisasi indikator kinerja sampai dengan eselon IV disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1
3.	Laporan aset per triwulan	a. apabila laporan aset disampaikan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya; dan b. apabila laporan aset disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	5 1
D.	CAPAIAN		
1	Indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil Renja		
	a. penyampaian indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil Renja	a. apabila evaluasi hasil renja disampaikan sampai dengan tanggal 10 setelah triwulan berakhir; dan b. apabila evaluasi hasil renja disampaikan setelah tanggal 10 setelah triwulan berakhir.	5 1
	b. capaian indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil Renja	a. apabila capaian indikator kinerja 91% s/d 100%; b. apabila capaian indikator kinerja 76% s/d <91%; c. apabila capaian indikator kinerja 66% s/d 76%; d. apabila capaian indikator kinerja 51% s/d <66%; dan e. apabila capaian indikator kinerja <51%.	5 4 3 2 1

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
2.	Tindaklanjut hasil pemeriksaan	a. apabila penyelesaian TLHP sebesar 100%;	5
		b. apabila penyelesaian TLHP sebesar 90% s.d <100%;	4
		c. apabila penyelesaian TLHP sebesar 80% s.d <90%;	3
		d. apabila penyelesaian TLHP sebesar 70% s.d <80%; dan	2
		e. apabila penyelesaian TLHP dibawah 70%.	1
3.	Fasilitasi ketepatan pencairan ADD dan DD		
	a. Ketepatan pencairan ADD	a. apabila pengajuan pencairan lengkap dan benar dilaksanakan pada triwulan bersangkutan;	5
		b. apabila pengajuan pencairan lengkap dan benar dilaksanakan pada 1 sampai dengan 7 hari kerja triwulan berikutnya; dan	3
		c. apabila pengajuan pencairan lengkap dan benar dilaksanakan lebih dari 7 hari kerja pada triwulan berikutnya.	1
	b. Ketepatan pencairan DD	a. apabila pengajuan pencairan lengkap dan benar dilaksanakan sebelum dana disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);	5

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
		b. apabila pengajuan pencairan lengkap dan benar dilaksanakan pada 1 sampai dengan 7 hari kerja setelah dana disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); dan	3
		c. apabila pengajuan pencairan lengkap dan benar dilaksanakan lebih dari 7 hari kerja dana disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).	1

B. DINAS/BADAN/KANTOR/ SEKRETARIAT DPRD/ SEKRETARIAT DAERAH :

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
A.	PERENCANAAN		
1.	Keselarasn DPA dengan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan KUA-PPAS	a. apabila keselarasn mencapai 100%;	5
		b. apabila keselarasn antara 90% s/d < 100%;	4
		c. apabila keselarasn antara 80% s/d < 90%;	3
		d. apabila keselarasn antara 70% s/d < 80%; dan	2
		e. apabila keselarasn < 70%.	1
2.	Penyusunan ROPK		
	a. ketepatan waktu penyusunan ROPK	a. apabila penyusunan ROPK dilaksanakan maksimal 15 hari kalender setelah APBD disahkan;	5

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
		b. apabila penyusunan ROPK dilaksanakan >15 hari s/d 30 hari kalender setelah APBD disahkan; dan c. apabila penyusunan ROPK dilaksanakan >30 hari setelah APBD disahkan	3 1
	b. kelengkapan penyusunan ROPK fisik dan keuangan	a. apabila ROPK fisik dan keuangan kegiatan telah disusun mencapai 90% s/d 100%; b. apabila ROPK fisik dan keuangan kegiatan telah disusun mencapai 70% s/d < 90%; dan c. apabila ROPK fisik dan keuangan kegiatan telah disusun < 70%.	5 3 1
B.	PELAKSANAAN		
1.	Penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan (pengajuan SPM)	a. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai $\geq 90\%$; b. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 80% s/d <90%; c. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 70% s/d <80%; d. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 60% s/d <70%; dan e. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai <60%.	5 4 3 2 1
2.	Realisasi kegiatan fisik (deviasi realisasi fisik dibandingkan	a. apabila deviasi <5 %; b. apabila deviasi antara 5% s/d <10%; dan c. apabila deviasi $\geq 10\%$.	5 3 1

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
	target)		
3.	Realisasi keuangan (deviasi realisasi keuangan dibandingkan target)	a. apabila deviasi <5 %; b. apabila deviasi antara 5% s/d <10%; dan c. apabila deviasi ≥10%.	5 3 1
4.	Revisi DPA	a. apabila tidak ada revisi DPA; b. apabila revisi DPA dilakukan 1 kali; c. apabila revisi DPA dilakukan 2 kali; d. apabila revisi DPA dilakukan 3 kali; dan e. apabila revisi DPA dilakukan lebih dari 3 kali.	5 4 3 2 1
5.	Pengumuman RUP dalam SIRUP	a. RUP lengkap terumumkan pada tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya; b. RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 20 Desember tahun anggaran sebelumnya; c. RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya; d. RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 10 Januari tahun anggaran berjalan; dan e. RUP lengkap terumumkan setelah tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berjalan.	5 4 3 2 1
C.	PELAPORAN		
1.	Laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIM	a. apabila laporan realisasi fisik dan keuangan disampaikan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya; dan	5

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
	hasil Renja	c. apabila capaian indikator kinerja 66% s/d <76%;	3
		d. apabila capaian indikator kinerja 51% s/d <66%; dan	2
		e. apabila capaian indikator kinerja <51%.	1
2.	Tindaklanjut hasil pemeriksaan	a. apabila penyelesaian TLHP sebesar 100%;	5
		b. apabila penyelesaian TLHP sebesar 90% s.d <100%;	4
		c. apabila penyelesaian TLHP sebesar 80% s.d <90%;	3
		d. apabila penyelesaian TLHP sebesar 70% s.d <80%; dan	2
		e. apabila penyelesaian TLHP dibawah 70%.	1

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 74 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BANTUL NOMOR 23
 TAHUN 2018 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN
 EVALUASI KINERJA PERANGKAT
 DAERAH

LEMBAR KRITERIA EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV

A. KECAMATAN

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
A.	PERENCANAAN		
1.	Keselarasan DPA dengan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan KUA-PPAS	a. apabila keselarasan mencapai 100%; b. apabila keselarasan antara 90% s/d < 100%; c. apabila keselarasan antara 80% s/d < 90%; d. apabila keselarasan antara 70% s/d < 80%; dan e. apabila keselarasan < 70%.	5 4 3 2 1
2.	Penyusunan ROPK		
	a. ketepatan waktu penyusunan ROPK	a. apabila penyusunan ROPK dilaksanakan maksimal 15 hari kalender setelah APBD disahkan; b. apabila penyusunan ROPK dilaksanakan >15 hari s/d 30 hari kalender setelah APBD disahkan; dan	5 3

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
		c. apabila penyusunan ROPK dilaksanakan >30 hari setelah APBD disahkan.	1
	b. kelengkapan penyusunan ROPK fisik dan keuangan	a. apabila ROPK fisik dan keuangan kegiatan telah disusun mencapai 90% s/d 100%; b. apabila ROPK fisik dan keuangan kegiatan telah disusun mencapai 70% s/d < 90%; dan c. apabila ROPK fisik dan keuangan kegiatan telah disusun < 70%.	5 3 1
B.	PELAKSANAAN		
1	realisasi kegiatan fisik (deviasi realisasi fisik dibandingkan target)	a. apabila deviasi <5 %; b. apabila deviasi antara 5% s/d <10%; dan c. apabila deviasi ≥10%.	5 3 1
2	realisasi keuangan (deviasi realisasi keuangan dibandingkan target)	a. apabila deviasi <5 %; b. apabila deviasi antara 5% s/d <10%; dan c. apabila deviasi ≥10%.	5 3 1
3.	Penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan (pengajuan SPM)	a. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai ≥ 90%; b. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 80% s/d <90%; c. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 70% s/d <80%; d. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 60% s/d <70%; dan	5 4 3 2

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
		e. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai <60%.	1
4.	Revisi DPA	a. apabila tidak ada revisi DPA;	5
		b. apabila revisi DPA dilakukan 1 kali;	4
		c. apabila revisi DPA dilakukan 2 kali;	3
		d. apabila revisi DPA dilakukan 3 kali; dan	2
		e. apabila revisi DPA dilakukan lebih dari 3 kali.	1
5.	Proses Pengadaan Barang dan Jasa		
	a. pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam SIRUP	a. RUP lengkap terumumkan pada tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya;	5
		b. RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 20 Desember tahun anggaran sebelumnya;	4
		c. RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;	3
		d. RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 10 Januari tahun anggaran berjalan; dan	2
		e. RUP lengkap terumumkan setelah tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berjalan.	1
	b. Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa	a. penyelesaian pengadaan barang dan jasa hingga akhir tahun anggaran mencapai 81% s/d 100% dari Seluruh Rencana Pengadaan Barang dan Jasa;	5

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
		b. penyelesaian pengadaan barang dan jasa hingga akhir tahun anggaran mencapai 61% s/d 80% dari Seluruh Rencana Pengadaan Barang dan Jasa;	4
		c. penyelesaian pengadaan barang dan jasa hingga akhir tahun anggaran mencapai 41% s/d 60% dari Seluruh Rencana Pengadaan Barang dan Jasa;	3
		d. penyelesaian pengadaan barang dan jasa hingga akhir tahun anggaran mencapai 21% s/d 40% dari Seluruh Rencana Pengadaan Barang dan Jasa; dan	2
		e. penyelesaian pengadaan barang dan jasa hingga akhir tahun anggaran mencapai 0% s/d 20% dari Seluruh Rencana Pengadaan Barang dan Jasa.	1
C.	PELAPORAN		
1.	Laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIM	a. apabila laporan realisasi fisik dan keuangan disampaikan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya; dan b. apabila laporan realisasi fisik dan keuangan disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	5 1
2.	Laporan aset per triwulan	a. apabila laporan aset disampaikan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya; dan b. apabila laporan disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	5 1

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
	b. capaian IKU dalam sistem akuntabilitas kinerja	a. apabila capaian IKU 90% s/d 100%; b. apabila capaian IKU 75% s/d <90%; c. apabila capaian IKU 65% s/d 75%; d. apabila capaian IKU 50% s/d <65%; dan e. apabila capaian IKU <50%.	5 4 3 2 1
3.	Nilai IKM	a. apabila nilai IKM 90 s/d 100; b. apabila nilai IKM 80 s/d < 90; c. apabila nilai IKM 70 s/d < 80; d. apabila nilai IKM 60 s/d < 70; dan e. apabila nilai IKM < 60.	5 4 3 2 1
4.	Fasilitasi ketepatan pencairan ADD dan realisasi APBDes		
	a. Ketepatan pencairan ADD	a. apabila pengajuan pencairan dilaksanakan pada triwulan bersangkutan; b. apabila pengajuan pencairan dilaksanakan pada 1 sampai dengan 7 hari kerja triwulan berikutnya; dan c. apabila pengajuan pencairan dilaksanakan lebih dari 7 hari kerja pada triwulan berikutnya.	5 3 1
	b. Realisasi APBDes	a. apabila realisasi penyerapan anggaran mencapai $\geq 90\%$; b. apabila realisasi penyerapan anggaran mencapai 80% s/d <90%; c. apabila realisasi penyerapan anggaran mencapai 70% s/d <80%;	5 4 3

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
		d. apabila realisasi penyerapan anggaran mencapai 60% s/d <70%; dan	2
		e. apabila realisasi penyerapan anggaran mencapai <60%.	1
E.	EVALUASI		
1.	Nilai AKIP	a. apabila nilai evaluasi AKIP 90 s/d 100;	5
		b. apabila nilai evaluasi AKIP 80 s/d < 90;	4
		c. apabila nilai evaluasi AKIP 70 s/d < 80;	3
		d. apabila nilai evaluasi AKIP 60 s/d < 70; dan	2
		e. e. apabila nilai evaluasi AKIP < 60.	1
2.	Hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya		
	a. hasil pemeriksaan	a. apabila hasil pemeriksaan tidak ada temuan;	5
		b. apabila hasil pemeriksaan hanya bersifat administratif dan telah ditindaklanjuti/ diselesaikan sebelum LHP keluar;	4
		c. apabila temuan hasil pemeriksaan terdapat penyetoran/ pengembalian uang/barang dan ditindaklanjuti sebelum LHP keluar;	3

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
		d. apabila temuan hasil pemeriksaan berupa penyetoran/pengembalian uang/barang dan/atau kelengkapan SPJ dan/atau administratif, ditindaklanjuti sebelum 2 (dua) bulan, sejak LHP diterima; dan	2
		e. apabila temuan hasil pemeriksaan baik bersifat administratif dan/atau penyetoran/pengembalian, ditindaklanjuti lebih dari 2 (dua) bulan, sejak LHP diterima.	1
	b. tindaklanjut hasil pemeriksaan	a. apabila penyelesaian TLHP sebesar 100%;	5
		b. apabila penyelesaian TLHP sebesar 90% s.d <100%;	4
		c. apabila penyelesaian TLHP sebesar 80% s.d <90%;	3
		d. apabila penyelesaian TLHP sebesar 70% s.d <80%; dan	2
		e. apabila penyelesaian TLHP dibawah 70%.	1

B. DINAS/BADAN/KANTOR/ SEKRETARIAT DPRD/ SEKRETARIAT DAERAH :

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
A.	PERENCANAAN		
1.	Keselarasn DPA dengan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan KUA-PPAS	a. apabila keselarasn mencapai 100%;	5
		b. apabila keselarasn antara 90% s/d < 100%;	4

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
		c. apabila keselarasan antara 80% s/d < 90%;	3
		d. apabila keselarasan antara 70% s/d < 80%; dan	2
		e. apabila keselarasan < 70%	1
2.	Penyusunan ROPK		
	a. ketepatan waktu penyusunan ROPK	a. apabila penyusunan ROPK dilaksanakan maksimal 15 hari kalender setelah APBD disahkan;	5
		b. apabila penyusunan ROPK dilaksanakan >15 hari s/d 30 hari kalender setelah APBD disahkan; dan	3
		c. apabila penyusunan ROPK dilaksanakan >30 hari setelah APBD disahkan.	1
	b. kelengkapan penyusunan ROPK fisik dan keuangan	a. apabila ROPK fisik dan keuangan kegiatan telah disusun mencapai 90% s/d 100%;	5
		b. apabila ROPK fisik dan keuangan kegiatan telah disusun mencapai 70% s/d < 90%; dan	3
		c. apabila ROPK fisik dan keuangan kegiatan telah disusun < 70%.	1
B.	PELAKSANAAN		
1	realisasi kegiatan fisik (deviasi realisasi fisik dibandingkan target)	a. apabila deviasi <5 %;	5
		b. apabila deviasi antara 5% s/d <10%; dan	3
		c. apabila deviasi ≥10%.	1
2	realisasi keuangan (deviasi realisasi keuangan dibandingkan)	a. apabila deviasi <5 %;	5
		b. apabila deviasi antara 5% s/d <10%; dan	3
		c. apabila deviasi ≥10%.	1

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
	target)		
3.	penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan (pengajuan SPM)	a. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai $\geq 90\%$; b. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 80% s/d $<90\%$; c. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 70% s/d $<80\%$; d. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 60% s/d $<70\%$; dan e. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai $<60\%$.	5 4 3 2 1
4.	Revisi DPA	a. apabila tidak ada revisi DPA; b. apabila revisi DPA dilakukan 1 kali; c. apabila revisi DPA dilakukan 2 kali; d. apabila revisi DPA dilakukan 3 kali; dan e. apabila revisi DPA dilakukan lebih dari 3 kali.	5 4 3 2 1
5.	Proses Pengadaan Barang dan Jasa		
	a. pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam SIRUP	a. RUP lengkap terumumkan pada tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya; b. RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 20 Desember tahun anggaran sebelumnya; c. RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;	5 4 3

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
		d. RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 10 Januari tahun anggaran berjalan; dan	2
		e. RUP lengkap terumumkan setelah tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berjalan.	1
	b. Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa	a. penyelesaian pengadaan barang dan jasa hingga akhir tahun anggaran mencapai 81% s/d 100% dari Seluruh Rencana Pengadaan Barang dan Jasa;	5
		b. penyelesaian pengadaan barang dan jasa hingga akhir tahun anggaran mencapai 61% s/d 80% dari Seluruh Rencana Pengadaan Barang dan Jasa;	4
		c. penyelesaian pengadaan barang dan jasa hingga akhir tahun anggaran mencapai 41% s/d 60% dari Seluruh Rencana Pengadaan Barang dan Jasa;	3
		d. penyelesaian pengadaan barang dan jasa hingga akhir tahun anggaran mencapai 21% s/d 40% dari Seluruh Rencana Pengadaan Barang dan Jasa; dan	2
		e. penyelesaian pengadaan barang dan jasa hingga akhir tahun anggaran mencapai 0% s/d 20% dari Seluruh Rencana Pengadaan Barang dan Jasa.	1

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
		e. apabila capaian indikator kinerja <51%.	1
2.	Indikator kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja		
	a. penyampaian indikator kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja	a. apabila realisasi indikator kinerja sampai dengan eselon IV disampaikan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya; dan b. apabila realisasi indikator kinerja sampai dengan eselon IV disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	5 1
	b. capaian IKU dalam sistem akuntabilitas kinerja	a. apabila capaian IKU 90% s/d 100%; b. apabila capaian IKU 75% s/d <90%; c. apabila capaian IKU 65% s/d 75%; d. apabila capaian IKU 50% s/d <65%; dan e. apabila capaian IKU <50%.	5 4 3 2 1
3.	Nilai IKM	a. apabila nilai IKM 90 s/d 100; b. apabila nilai IKM 80 s/d < 90; c. apabila nilai IKM 70 s/d < 80; d. apabila nilai IKM 60 s/d < 70; dan e. apabila nilai IKM < 60.	5 4 3 2 1
E.	EVALUASI		
1.	Nilai AKIP	a. apabila nilai evaluasi AKIP 90 s/d 100; b. apabila nilai evaluasi AKIP 80 s/d < 90; c. apabila nilai evaluasi AKIP 70 s/d < 80;	5 4 3

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
		d. apabila nilai evaluasi AKIP 60 s/d < 70; dan	2
		e. apabila nilai evaluasi AKIP < 60.	1
2.	Hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya		
	a. hasil pemeriksaan	a. apabila hasil pemeriksaan tidak ada temuan;	5
		b. apabila hasil pemeriksaan hanya bersifat administratif dan telah ditindaklanjuti/ diselesaikan sebelum LHP keluar;	4
		c. apabila temuan hasil pemeriksaan terdapat penyetoran/ pengembalian uang/barang dan ditindaklanjuti sebelum LHP keluar;	3
		d. apabila temuan hasil pemeriksaan berupa penyetoran/pengembalian uang/barang dan/atau kelengkapan SPJ dan/atau administratif, ditindaklanjuti sebelum 2 (dua) bulan, sejak LHP diterima; dan	2
		e. apabila temuan hasil pemeriksaan baik bersifat administratif dan/atau penyetoran/ pengembalian, ditindaklanjuti lebih dari 2 (dua) bulan, sejak LHP diterima.	1
	b. tindaklanjut hasil pemeriksaan	a. apabila penyelesaian TLHP sebesar 100%;	5
		b. apabila penyelesaian TLHP sebesar 90% s.d <100%;	4

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
		c. apabila penyelesaian TLHP sebesar 80% s.d <90%;	3
		d. apabila penyelesaian TLHP sebesar 70% s.d <80%; dan	2
		e. apabila penyelesaian TLHP dibawah 70%.	1

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO